



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN MANTUP

Jl. Ayam Alas No. 45 Mantup Kodepos: 62283
Telp. (0322) 4672299, Fax. (0322)4672299, Email: mantup@lamongankab.go.id
website : www.lamongankab.go.id

Lamongan, 02 April 2026

Nomor : 700.1.2.1/ 126.1 /413.316/2026
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Laporan Pengelolaan Risiko Tribulan I
Tahun 2026 Kecamatan Mantup
Kabupaten Lamongan

Kepada :

Yth. Bpk. Bupati Lamongan

di -

LAMONGAN

Disampaikan dengan hormat laporan Pengelolaan Risiko Tribulan I Tahun 2026 Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan sebagaimana terlampir

Demikian untuk menjadi periksa.

CAMAT MANTUP

ILYAS, S.Kep., Ns..
Penata Tk. I
NIP. 19720220 199403 1 006

TEMBUSAN, disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
2. Unit Kepatuhan Resiko Pemerintah
Daerah Kabupaten Lamongan.






**LAPORAN PENGELOLAAN RISIKO
TRIBUNAN I TAHUN 2026
KECAMATAN MANTUP
KABUPATEN LAMONGAN**



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN MANTUP

Jl. Ayam Alas No. 45 Mantup Kodepos: 62283
Telp. (0322) 4672299, Fax. (0322)4672299, Email: mantup@lamongankab.go.id
website : www.lamongankab.go.id

NO DOKUMEN	:	700.1.2.1/ 126.1 /413.316/2026
TANGGAL TERBIT	:	02 April 2026

Disiapkan Oleh	:	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan Kecamatan Mantup  SATIP, S.H. NIP. 19690818 199203 1 010 Anggota Unit Pemilik Resiko
Diperiksa	:	Sekretaris Kecamatan Mantup  SODOH PORNOMO, S.H. NIP. 19760515 199803 1 002 Kordinator Unit Pemilik Resiko
Disahkan Oleh	:	Kamat Mantup  ILYAS, S.Kep., Ns. NIP. 19720220 199403 1 006 Ketua Unit Pemilik resiko

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengertian manajemen risiko suatu proses identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian, dan upaya menghindari, meminimalisir atau bahkan menghapus risiko yang tidak dapat diterima. Risiko berhubungan dengan pendekatan atau metodologi dalam menghadapi ketidakpastian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan dari suatu tindakan.

Ketidakpastian ini berupa ancaman, pengembangan strategi dan mitigasi risiko. Manajemen risiko adalah suatu proses perencanaan, pengaturan, pemimpinan, dan pengontrolan aktivitas sebuah organisasi. Penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Manajemen risiko juga dapat disebut sebagai salah satu cara untuk mengorganisir suatu risiko yang nantinya akan dihadapi baik itu sudah diketahui atau belum diketahui yang tidak terpikirkan dengan memindahkan risiko kepada pihak lain atau mengurangi efek negatif dari risiko dan menampung baik sebagian atau semua konsekuensi risiko dari beberapa aktifitas manusia.

Dimana proses manajemen risiko yg meliputi penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Oleh sebab itu melalui manajemen risiko diharapkan ketidakpastian yang menimbulkan kerugian dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan karena setiap kegiatan pasti ada risiko yang akan ditimbulkan.

Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan menetapkan 1 (satu) tujuan yaitu Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan. Untuk menunjang pencapaian tujuan strategis tersebut disusunlah peta strategi yang terdiri dari 2 (dua) sasaran strategis yaitu 1). Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Pelayanan Publik dan 2). Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik..

Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan sebagai salah satu unsur penunjang urusan pemerintah dibidang kewilayahan menyadari sepenuhnya akan pentingnya pengelolaan resiko beserta tindakan pengendalian yang diperlukan. Di dorong dengan adanya kesadaran

tersebut Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan akan selalu melakukan monitoring dalam pengendalian resiko yang terjadi baik operasional maupun strategis. Hal tersebut dilakukan agar pengendalian resiko yang dibangun efektif dan efisien sebagai upaya mengamankan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Manajemen risiko diterapkan dengan maksud untuk menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Penerapan manajemen risiko khususnya pada Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II serta Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV bertujuan untuk :

- a. Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah ;
- b. Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja ;
- c. Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif ;

- d. Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan;
- e. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi ;
- f. Meningkatkan ketahanan organisasi ;
- g. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

D. RUANG LINGKUP

Manajemen risiko pada Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia, dan lingkungan yang meliputi :

- Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya ;
- Identifikasi risiko ;
- Analisis risiko ;
- Evaluasi risiko ;
- Pengendalian risiko ;
- Pemantauan dan telaah ulang ;
- Koordinasi dan komunikasi.

II. RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO

A. RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN I

Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan telah menyusun kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada periode tribulan I sebagaimana terlampir:

No Risiko	Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian	Realisasi
Risiko Strategis OPD Kecamatan Mantup:								
1	Perencanaan kinerja tidak selaras	RSO.26.99.316.01	Pedoman SAKIP, revidi dokumen perencanaan oleh Bappeda	Reviu belum fokus pada keterkaitan outcome dan indikator	Monitoring dan evaluasi berkala atas keselarasan perencanaan dan realisasi kinerja	Camat	Januari-Desember 2026	Telah Realisasi Tribulan I
2	Pelaporan kinerja tidak menggambarkan capaian yang sebenarnya	RSO.26.99.316.02	Penyusunan LKJIP tahunan	Belum ada mekanisme uji kualitas data secara sistematis	Review LKJIP oleh APIP	Camat	Januari-Desember 2026	Telah Realisasi Tribulan I
3	Rekomendasi hasil evaluasi SAKIP tidak ditindaklanjuti secara optimal	RSO.26.99.316.03	Penyampaian LHE SAKIP kepada unit kerja - Rapat evaluasi kinerja tahunan	Tidak adanya monitoring dan pelaporan berkala atas progres tindak lanjut rekomendasi. Belum diterapkannya reward and punishment atas kepatuhan tindak lanjut rekomendasi SAKIP.	Monitoring dan pelaporan tindak lanjut secara berkala	Camat	Januari-Desember 2026	Telah Realisasi Tribulan I
4	Penerapan Manajemen Risiko belum efektif dan terintegrasi	RSO.26.99.316.04	Kebijakan MR - Pembentukan Tim MR"	Peran dan tanggung jawab pemilik risiko (risk owner) belum ditetapkan secara jelas	Integrasi MR dalam perencanaan & penganggaran. Penguatan peran pimpinan	Camat	Januari-Desember 2026	Telah Realisasi Tribulan I
5	Dokumen Manajemen Risiko tidak lengkap dan tidak mutakhir	RSO.26.99.316.05	Penyusunan Register risiko tahunan	Belum ada kewajiban pelibatan seluruh unit kerja, register risiko hanya dilakukan oleh unit tertentu	Reviu dan update risiko berkala	Camat	Januari-Desember 2026	Telah Realisasi Tribulan I
6	Kompetensi SDM dalam manajemen risiko rendah	RSO.26.99.316.06	Sosialisasi MR/Bimtek Terbatas oleh Inspektorat	Pelatihan tidak berkelanjutan dan tidak menjangkau seluruh pegawai	Penugasan PIC MR di unit kerja, Pelaporan risiko berkala	Camat	Januari-Desember 2026	Telah Realisasi Tribulan I
7	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik rendah	RSO.26.99.316.07	SOP Pelayanan - Monitoring dan evaluasi secara berkala	Jaringan internet yang sering trobel - ketersediaan blanko - sarpras penunjang kurang memadai karena keterbatasan anaggaran untuk pengadaan	koordinasi dengan dinas terkait, inovasi pelayanan, pengadaan sarpras penunjang	Camat	Januari-Desember 2026	Telah Realisasi Tribulan I
8	Keterlambatan pelayanan	RSO.26.99.316.08	SOP Pelayanan - Monitoring dan evaluasi secara berkala	Jaringan internet yang sering trobel - ketersediaan blanko - sarpras penunjang kurang memadai karena keterbatasan anaggaran untuk pengadaan	koordinasi dengan dinas terkait, inovasi pelayanan, pengadaan sarpras	Camat	Januari-Desember 2026	Telah Realisasi Tribulan I
9	Nilai IKM unit layanan tidak mencapai target organisasi.	RSO.26.99.316.09	SOP Pelayanan - Monitoring dan evaluasi secara berkala	Jaringan internet yang sering trobel - ketersediaan blanko - sarpras penunjang kurang memadai karena keterbatasan anaggaran untuk pengadaan	koordinasi dengan dinas terkait, inovasi pelayanan, pengadaan sarpras penunjang	Camat	Januari-Desember 2026	Telah Realisasi Tribulan I

Risiko Operasional OPD Kecamatan Mantup:

1	Keterlambatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	ROO.26.99.316.01	Jadwal penyusunan dokumen sudah ditetapkan	Jadwal belum realistis, koordinasi lintas unit lemah	Menyusun timeline realistis, melakukan koordinasi rutin dengan OPD terkait	Kasubag perencanaan, evaluasi dan keuangan	Januari-Desember 2026	Telah Realisasi Tribulan I
2	Manipulasi data capaian kinerja (risiko fraud)	ROO.26.99.316.02	Review laporan oleh pimpinan unit	Review internal terbatas, tidak semua data diverifikasi	Pengecekan lintas unit dan penggunaan data sumber primer	Kasubag perencanaan, evaluasi dan keuangan	Januari-Desember 2026	Telah Realisasi Tribulan I
3	Keterlambatan Penyusunan Laporan Keuangan Periodik	ROO.26.99.316.03	jadwal pelaporan, Penugasan staf keuangan	Kepatuhan terhadap tenggat masih rendah, Pembagian tugas belum optimal	Menetapkan batas waktu tegas, reminder resmi, Membentuk tim penyusun laporan periodik dan pembagian tugas yang jelas	Kasubag perencanaan, evaluasi dan keuangan	Januari-Desember 2026	Telah Realisasi Tribulan I
4	Laporan keuangan tidak lengkap atau tidak akurat	ROO.26.99.316.04	Aplikasi keuangan dan supervisi atasan, Rekonsiliasi internal	Human error masih terjadi, Rekonsiliasi belum rutin	Checklist dokumen laporan, Menetapkan rekonsiliasi berkala	Kasubag perencanaan, evaluasi dan keuangan	Januari-Desember 2026	Telah Realisasi Tribulan I
5	Data kepegawaian perangkat daerah tidak akurat/tidak update	ROO.26.99.316.05	Verifikasi berjenjang dan penggunaan aplikasi sistem kepegawaian	Belum ada jadwal pemutakhiran data yang baku dan terdokumentasi	Penyusunan jadwal rutin pemutakhiran data kepegawaian dan monitoring berkala	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	Januari-Desember 2026	Telah Realisasi Tribulan I
6	Administrasi kepegawaian tidak tertib dan tidak terdokumentasi dengan baik	ROO.26.99.316.06	Penerapan SOP administrasi kepegawaian	Pemahaman SOP belum merata	Sosialisasi dan penguatan penerapan SOP	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	Januari-Desember 2026	Telah Realisasi Tribulan I
7	Administrasi umum tidak tertib	ROO.26.99.316.07	Penerapan dan pengawasan kepatuhan terhadap prosedur administrasi	Pengawasan kepatuhan terhadap prosedur administrasi belum berjalan optimal	Melaksanakan pengawasan secara rutin dan berjenjang	Sekretaris/Kasubbag Umum dan kepegawaian	Januari-Desember 2026	Telah Realisasi Tribulan I
8	Koordinasi antar unit kerja dan lintas sektor tidak optimal	ROO.26.99.316.08	Penguatan koordinasi dan komunikasi antar unit kerja	Evaluasi efektivitas koordinasi dan komunikasi antar unit kerja belum dilakukan secara berkala	Melaksanakan evaluasi berkala terhadap efektivitas koordinasi dan komunikasi antar unit kerja	Sekretaris/Kasubbag Umum dan kepegawaian	Januari-Desember 2026	Telah Realisasi Tribulan I
9	Anggaran/Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pengadaan barang dan jasa di mark up (risiko fraud)	ROO.26.99.316.09	Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Data harga tidak mutakhir, revidi HPS belum independen	Pemanfaatan e-catalog/price database resmi secara optima	Camat	Januari-Desember 2026	Telah Realisasi Tribulan I
10	Spesifikasi barang tidak sesuai kontrak (risiko kemitraan)	ROO.26.99.316.10	- BAST - Pemeriksaan administrasi dan fisik barang	Pemeriksaan barang bersifat administratif, kolusi dengan penyedia	Pemeriksaan teknis sesuai kontrak, pengawasan melekat oleh PA	Camat	Januari-Desember 2026	Telah Realisasi Tribulan I
11	Keterlambatan pembayaran tagihan Listrik dan air	ROO.26.99.316.11	penyampain informasi jumlah tagihan listrik dan air secara rutin.	keterbatasan waktu dan kelalaian	Pembayaran lebih awal sebelum jatuh tempo dan konfirmasi pembayaran	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Januari-Desember 2026	Telah Realisasi Tribulan I
12	Keterlambatan pelaksanaan pemeliharaan BMD peralatan dan mesin kantor	ROO.26.99.316.12	Penguatan pencatatan, inventarisasi, dan pelaporan BMD	Pencatatan BMD belum dilakukan secara tertib dan akurat	Menertibkan pencatatan BMD sesuai ketentuan perundang-undangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Januari-Desember 2026	Telah Realisasi Tribulan I

13	Kendaraan dinas tidak terpelihara dengan baik sehingga tidak layak jalan dan tidak siap operasional	ROO.26.99.316.13	Pendataan kendaraan dinas dan pemantauan masa berlaku pajak kendaraan	Belum adanya pengingat (reminder) pembayaran pajak dan jadwal pemeliharaan	Menyusun jadwal pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	Januari-Desember 2026	Telah Realisasi Tribulan I
14	Administrasi dan pelaporan pemeliharaan Barang Milik Daerah tidak tertib dan tidak lengkap	ROO.26.99.316.14	Penyusunan laporan dan penyimpanan dokumen kegiatan secara periodik	Dokumentasi belum terdigitalisasi dan belum tersusun sistematis	Menata dan mengarsipkan dokumen pemeliharaan/rehabilitasi gedung secara tertib dan terstruktur	Pengelola Sarana/Prasarana/Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Januari-Desember 2026	Telah Realisasi Tribulan I
15	Terjadinya keterlambatan pelayanan kepada masyarakat	ROO.26.99.316.15	- Maklumat Pelayanan - SOP Pelayanan - Kanal Pengaduan	kendala jaringan dan keterbatasan jumlah opertor	Penerapan SOP Pelayanan dan koordinasi dengan dinas terkait	Kasi Pelayanan	Januari-Desember 2026	Telah Realisasi Tribulan I
16	Pungutan Liar atau Gratifikasi (Fraud)	ROO.26.99.316.16	- Maklumat Pelayanan - SOP Pelayanan - Kanal Pengaduan	Kurangnya partisipasi dalam pelayanan dan laporan pengaduan belum sesuai	Penerapan SOP Pelayanan dan Pengawasan oleh pimpinan	Kasi Pelayanan	Januari-Desember 2026	Telah Realisasi Tribulan I
17	Copy-paste usulan lama tanpa proses partisipatif nyata masyarakat	ROO.26.99.316.17	- Tersedia arsip hasil Musrenbang tahun sebelumnya - Jadwal Musrenbang telah ditetapkan - Tersedia format baku usulan kegiatan - Input usulan melalui SIPD/ e-Planning	- Evaluasi capaian usulan tahun lalu tidak terdokumentasi - Notulen tidak mencatat usulan baru vs lama - SIPD tidak membedakan usulan hasil copy-paste	Dokumentasi proses partisipatif, Review dan verifikasi berlapis oleh kecamatan dan OPD teknis	Camat, Kasi PPM	Januari-Desember 2026	Telah Realisasi Tribulan I
18	Koordinasi Antar Pemangku Kepentingan Kurang Optimal	ROO.26.99.316.18	-Rapat koordinasi rutin. - Pembagian tugas jelas. - Monitoring dan evaluasi bersama.	"-Koordinasi belum mencakup semua lembaga terkait. - Pembagian tugas kadang tidak diikuti secara konsisten. - Monitoring dan evaluasi belum rutin dan menyeluruh."	Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan secara rutin dan terdokumentasi.	Camat, Kasi PPM	Januari-Desember 2026	Telah Realisasi Tribulan I
19	Rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan PKK	ROO.26.99.316.19	Sosialisasi kegiatan PKK Desa dan penyampaian informasi kegiatan melalui pengumuman	belum menjangkau kegiatan masyarakat jadwal kegiatan yang tidak sesuai dengan waktu luang masyarakat	Sosialisasi melalui berbagai media penyesuaian waktu kegiatan	Camat, Kasi PPM, Kader PKK	Januari-Desember 2026	Telah Realisasi Tribulan I
20	Pelaksanaan kegiatan tidak tepat waktu.	ROO.26.99.316.20	Penyusunan jadwal dan rencana kerja kegiatan, pembagian tugas pelaksana, koordinasi melalui rapat, serta monitoring pelaksanaan secara berkala.	Jadwal yang kurang realistis, pembagian tugas yang belum jelas, koordinasi yang belum optimal, serta monitoring pelaksanaan yang belum konsisten.	Perbaiki dan penyesuaian jadwal kegiatan, monitoring agar kegiatan berjalan tepat waktu.	Camat, Kasi PPM	Januari-Desember 2026	Telah Realisasi Tribulan I

21	Kegiatan koordinasi dengan lembaga/ instansi terkait belum optimal	ROO.26.99.316.21	- Penugasan personel Trantibum kecamatan - Koordinasi insidental dengan Satpol PP, Polsek, dan Koramil - Patroli rutin terbatas - Tersedia SOP penanganan Trantibum - Pelaporan kejadian kepada pimpinan	- Belum tersedia peta kerawanan Trantibum • SOP belum disosialisasikan dan disimulasikan • Koordinasi belum bersifat rutin dan terdokumentasi • Sarpras belum mencukupi kebutuhan lapangan • Evaluasi penanganan kejadian belum sistematis	Penguatan koordinasi melalui rapat rutin lintas instansi	Kasi Trantibum	Januari-Desember 2026	Telah Realisasi Tribulan I
22	Hasil kegiatan tidak terdokumentasi dan tidak ditindaklanjuti secara berkelanjutan.	ROO.26.99.316.22	Penyampaian laporan situasi wilayah dengan cara komunikasi cepat melalui media informal.	Rencana tindak lanjut belum terdokumentasi secara sistematis.	Menyusun rencana tindak lanjut setiap hasil koordinasi.	Kasi Trantibum	Januari-Desember 2026	Telah Realisasi Tribulan I
23	Penugasan dari Kepala Daerah tidak tersampaikan dengan jelas atau berubah-ubah	ROO.26.99.316.23	Surat penugasan, koordinasi internal, pelaporan kepada pimpinan	Monitoring belum berbasis indikator, koordinasi lintas sektor belum terstruktur	Penguatan koordinasi lintas OPD/Forkopimcam, monitoring dan evaluasi berkala	Kasi Trantibum	Januari-Desember 2026	Telah Realisasi Tribulan I
24	Evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan umum tidak dilakukan secara optimal	ROO.26.99.316.24	Monitoring oleh atasan langsung	tidak ada tindak lanjut hasil evaluasi	Menyusun laporan evaluasi kegiatan	Kasi Trantibum	Januari-Desember 2026	Telah Realisasi Tribulan I
25	Dokumen administrasi desa tidak tertib dan lengkap	ROO.26.99.316.25	Konferensi Perangkat Desa, Penugasan Perangkat Desa	Tidak adanya SOP administrasi yang baku, Pemisahan tugas dan kewenangan belum jelas, Kurangnya mekanisme verifikasi dan pengesahan dokumen	Penyusunan dan penerapan SOP Administrasi Desa, verifikasi dan pengesahan berjenjang	Kasi Pemerintahan	Januari-Desember 2026	Telah Realisasi Tribulan I
26	Rendahnya kepatuhan pemerintah desa terhadap rekomendasi pembinaan	ROO.26.99.316.26	Pendampingan oleh kecamatan dan pendamping desa	Dokumentasi hasil tindak lanjut belum tertib	Menyusun mekanisme monitoring dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi pembinaan desa	Camat, Kasi Pemerintahan, Kasi PPM	Januari-Desember 2026	Telah Realisasi Tribulan I

Kegiatan pengendalian dilakukan untuk mengatasi resiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi resiko telah dilakukan secara efektif. Kebijakan dan prosedur dalam kegiatan pengendalian resiko harus ditetapkan secara tertulis dan dilaksanakan sesuai yang telah ditetapkan. Sehingga dapat menjamin kegiatan pengelolaan resiko telah sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan dan harus dievaluasi secara teratur.

B. REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN I

Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan telah melaksanakan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan I sebagaimana tabel berikut:

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak				
Risiko Strategis OPD Kecamatan Mantup:									
1	Perencanaan kinerja tidak selaras	RSO.26.99.316.01	-	-	-	-	Monitoring dan evaluasi berkala atas keselarasan perencanaan dan realisasi kinerja	Setiap tribulan	Tribulan I
2	Pelaporan kinerja tidak menggambarkan capaian yang sebenarnya	RSO.26.99.316.02	-	-	-	-	Review LKJIP oleh APIP	Tribulan I atau II	-
3	Rekomendasi hasil evaluasi SAKIP tidak ditindaklanjuti secara optimal	RSO.26.99.316.03	-	-	-	-	Monitoring dan pelaporan tindak lanjut secara berkala	Setiap Tribulan	Tribulan I
4	Penerapan Manajemen Risiko belum efektif dan terintegrasi	RSO.26.99.316.04	-	-	-	-	Integrasi MR dalam perencanaan & penganggaran, Penguatan peran pimpinan	Setiap Tribulan	Tribulan I
5	Dokumen Manajemen Risiko tidak lengkap dan tidak mutakhir	RSO.26.99.316.05	-	-	-	-	Reviu dan update risiko berkala	Setiap Tribulan	Tribulan I
6	Kompetensi SDM dalam manajemen risiko rendah	RSO.26.99.316.06	-	-	-	-	Penugasan PIC MR di unit kerja, Pelaporan risiko berkala	Setiap Tribulan	Tribulan I
7	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik rendah	RSO.26.99.316.07	-	-	-	-	koordinasi dengan dinas terkait, inovasi pelayanan, pengadaan sarpras penunjang	Setiap Tribulan	Tribulan I
8	Keterlambatan pelayanan	RSO.26.99.316.08	-	-	-	-	koordinasi dengan dinas terkait, inovasi pelayanan, penganggaran sarpras	Setiap Tribulan	Tribulan I
9	Nilai IKM unit layanan tidak mencapai target organisasi.	RSO.26.99.316.09	-	-	-	-	koordinasi dengan dinas terkait, inovasi pelayanan, pengadaan sarpras penunjang	Setiap Tribulan	Tribulan I
Risiko Operasional OPD Kecamatan Mantup:									
1	Keterlambatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	ROO.26.99.316.01	-	-	-	-	Menyusun timeline realistis, melakukan koordinasi rutin dengan OPD terkait	Setiap Tribulan	Tribulan I
2	Manipulasi data capaian kinerja (risiko fraud)	ROO.26.99.316.02	-	-	-	-	Pengecekan lintas unit dan penggunaan data sumber primer	Setiap Tribulan	Tribulan I
3	Keterlambatan Penyusunan Laporan Keuangan Periodik	ROO.26.99.316.03	-	-	-	-	Menetapkan batas waktu tegas, reminder resmi, Membentuk tim penyusun laporan periodik dan pembagian tugas yang jelas	Setiap Tribulan	Tribulan I
4	Laporan keuangan tidak lengkap atau tidak akurat	ROO.26.99.316.04	-	-	-	-	Checklist dokumen laporan, Menetapkan rekonsiliasi berkala	Setiap Tribulan	Tribulan I
5	Data kepegawaian perangkat daerah tidak akurat/tidak update	ROO.26.99.316.05	-	-	-	-	Penyusunan jadwal rutin pemutakhiran data kepegawaian dan monitoring berkala	Setiap Tribulan	Tribulan I
6	Administrasi kepegawaian tidak tertib dan tidak terdokumentasi dengan baik	ROO.26.99.316.06	-	-	-	-	Sosialisasi dan penguatan penerapan SOP	Setiap Tribulan	Tribulan I
7	Administrasi umum tidak tertib	ROO.26.99.316.07	-	-	-	-	Melaksanakan pengawasan secara rutin dan berjenjang	Setiap Tribulan	Tribulan I
8	Koordinasi antar unit kerja dan lintas sektor tidak optimal	ROO.26.99.316.08	-	-	-	-	Melaksanakan evaluasi berkala terhadap efektivitas koordinasi dan komunikasi antar unit kerja	Setiap Tribulan	Tribulan I
9	Anggaran/Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pengadaan barang dan jasa di mark up (risiko fraud)	ROO.26.99.316.09	-	-	-	-	Pemanfaatan e-catalog/price database resmi secara optima	Setiap Tribulan	Tribulan I
10	Spesifikasi barang tidak sesuai kontrak (risiko kemitraan)	ROO.26.99.316.10	-	-	-	-	Pemeriksaan teknis sesuai kontrak, pengawasan melekat oleh PA	Setiap Tribulan	Tribulan I
11	Keterlambatan pembayaran tagihan Listrik dan air	ROO.26.99.316.11	-	-	-	-	Pembayaran lebih awal sebelum jatuh tempo dan konfirmasi pembayaran	Setiap Tribulan	Tribulan I
12	Keterlambatan pelaksanaan pemeliharaan BMD peralatan dan mesin kantor	ROO.26.99.316.12	-	-	-	-	Menertibkan pencatatan BMD sesuai ketentuan perundang-undangan	Setiap Tribulan	Tribulan I
13	Kendaraan dinas tidak terpelihara dengan baik sehingga tidak layak jalan dan tidak siap operasional	ROO.26.99.316.13	-	-	-	-	Menyusun jadwal pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas	Setiap Tribulan	Tribulan I
14	Administrasi dan pelaporan pemeliharaan Barang Milik Daerah tidak tertib dan tidak lengkap	ROO.26.99.316.14	-	-	-	-	Menata dan mengarsipkan dokumen pemeliharaan/rehabilitasi gedung secara tertib dan terstruktur	Setiap Tribulan	Tribulan I
15	Terjadinya keterlambatan pelayanan kepada masyarakat	ROO.26.99.316.15	-	-	-	-	Penerapan SOP Pelayanan dan koordinasi dengan dinas terkait	Setiap Tribulan	Tribulan I
16	Pungutan Liar atau Gratifikasi (Fraud)	ROO.26.99.316.16	-	-	-	-	Penerapan SOP Pelayanan dan Pengawasan oleh pimpinan	Setiap Tribulan	Tribulan I
17	Copy-paste usulan lama tanpa proses partisipatif nyata masyarakat	ROO.26.99.316.17	-	-	-	-	Dokumentasi proses partisipatif, Review dan verifikasi berlapis oleh kecamatan dan OPD teknis	Tribulan II	Tribulan I
18	Koordinasi Antar Pemangku Kepentingan Kurang Optimal	ROO.26.99.316.18	-	-	-	-	Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan secara rutin dan terdokumentasi.	Setiap Tribulan	Tribulan I
19	Rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan PKK	ROO.26.99.316.19	-	-	-	-	Sosialisasi melalui berbagai media penyesuaian waktu kegiatan	Tribulan III	Tribulan I

20 Pelaksanaan kegiatan tidak tepat waktu.	ROO.26.99.316.20	-	-	-	-	Perbaikan dan penyesuaian jadwal kegiatan, monitoring agar kegiatan berjalan tepat waktu.	Tribulan III	Tribulan I
21 Kegiatan koordinasi dengan lembaga/instansi terkait belum optimal	ROO.26.99.316.21	-	-	-	-	Penguatan koordinasi melalui rapat rutin lintas instansi	Setiap Tribulan	Tribulan I
22 Hasil kegiatan tidak terdokumentasi dan tidak ditindaklanjuti secara berkelanjutan.	ROO.26.99.316.22	-	-	-	-	Menyusun rencana tindak lanjut setiap hasil koordinasi.	Setiap Tribulan	Tribulan I
23 Penugasan dari Kepala Daerah tidak tersampaikan dengan jelas atau berubah-ubah	ROO.26.99.316.23	-	-	-	-	Penguatan koordinasi lintas OPD/ Forkopimcam, monitoring dan evaluasi berkala	Setiap Tribulan	Tribulan I
24 Evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan umum tidak dilakukan secara optimal	ROO.26.99.316.24	-	-	-	-	Menyusun laporan evaluasi kegiatan	Setiap Tribulan	Tribulan I
25 Dokumen administrasi desa tidak tertib dan lengkap	ROO.26.99.316.25	-	-	-	-	Penyusunan dan penerapan SOP Administrasi Desa, verifikasi dan pengesahan berjenjang	Tribulan II	Tribulan I
26 Rendahnya kepatuhan pemerintah desa terhadap rekomendasi pembinaan	ROO.26.99.316.26	-	-	-	-	Menyusun mekanisme monitoring dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi pembinaan desa	Tribulan II	Tribulan I

Pemantauan pengendalian resiko pada dasarnya adalah untuk memastikan apakah sistem pengendalian resiko yang ada telah berjalan sebagaimana yang diharapkan. Dan perbaikan yang perlu dilakukan telah dilaksanakan sesuai dengan perkembangan. Pengendalian yang tidak terpantau cenderung memberikan pengaruh yang buruk dalam jangka waktu tertentu.

III. HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Tidak terdapat kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian atau hal-hal yang menyebabkan terjadinya gap antara rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan risiko pada Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan.

IV. MONITORING RISIKO DAN RTP

Dari hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada triwulan III dan dari hasil monitoring ini juga dapat dianalisa bahwa belum diperlukan pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode triwulan berikutnya.

V. PENUTUP

Dari hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan I dapat simpulan bahwa pemantauan dan evaluasi atas pengendalian resiko pada dasarnya bertujuan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang ditetapkan telah berjalan efektif dalam mengatasi resiko serta menganalisis kembali apakah tindakan perngendalian di perlukan perbaikan sebagai dasar pertimbangan sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada

periode ini dan sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah kami akan melakukan pemantauan berkelanjutan atas pelaksanaan rencana tindak pengendalian yang telah ditetapkan apakah telah dan berjalan secara efektif guna mencapai tujuan organisasi.